

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT *HINTERLAND*
(Studi Kasus Kelurahan Sembulang)**

SKRIPSI



Oleh

SADAM

NIM 100565201344

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

Abstrak

Negara telah mewajibkan untuk merealisasikan sedikitnya 20% anggaran pendapatan dan belanja untuk pendidikan sehingga diharapkan masyarakat Indonesia bisa merasakan dunia pendidikan dinegaranya sendiri dan terbebas dari kebodohan. Konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap warga Negara, sehingga bukan menjadi alasan bahwa letak geografis atau rentang kendalai merupakan hambatan untuk tidak bisa mengakses atau mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara. Salah satu pihak yang mengatasi masalah ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Batam

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pemo Batam dalam peningkatan mutu pendidikan masyarakat hinterland oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, artinya bahwa peneliti berusaha menggambarkan masalah, menjelaskan, atau mengungkapkan gejala-gejala yang ada mengenai pemberdayaan masyarakat *hinterland* di Kota Batam. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil yang ditemukan adalah bahwa Dinas Pendidikan Kota Batam yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pendidikan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat *hinterland* belum melaksanakan fungsinya di bidang pemberdayaan pendidikan masyarakat *hinterland* guna meningkatkan kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi

belum menyentuh masyarakat secara langsung, belum ada perbedaan yang signifikan antara daerah *hinterland* dan *mainland*.

Kata kunci: Hinterland, pemerintah, strategi



Abstract

The state has obliged to realizes at least 20% of the budget revenue and expenditure for education, expecting the peoples of Indonesia could get education in his own country and free from stupidity. Indonesia State Constitution has mandated that education is a right for every citizen, so it is not a reason that the geographic location or range forms a barrier to access or can not get a decent education services for every citizen. One of the board which overcome this problem is Batam City Department of Education.

The purpose of this research was to determine how the empowerment for hinterland community by the Department of Education, Batam. researchers used a descriptive qualitative research method, meaning that the researchers sought to describe the problem, explain or express symptoms that last about community empowerment hinterland in Batam. Data analysis technique using qualitative descriptive technique.

Results found is that the Department of Education of Batam City which is the comission of the local goverment in the field of education for public that includes the hinterland communities have not been performing its functions in the field of education empowerment to hinterland society in order to improve people's lives through education. This is caused by socialization has not touched the public directly, there is no significant difference between the hinterland and the mainland.

Keywords: empowerment, nationalism, strategy

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT *HINTERLAND*
(Studi Kasus Kelurahan Sembulang)**

A. Latar Belakang

Setelah runtuhnya rezim yang paling berkuasa pada masa orde baru, maka Indonesia memasuki era baru yang berubah sangat drastis dan spektakuler. Sistem pemerintahan yang sentralistis dan kekuasaan negara yang otoriter berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistis dan demokrasi. Jika sebelumnya mengurus rumah tangga sendiri merupakan mimpi disiang hari bagi daerah, maka pada saat ini semua itu menjadi sangat nyata. Hingga saat ini, Indonesia menjadi negara yang menganut azas desentralisasi yang mana melahirkan suatu konsep terbaru, otonomi daerah.

Otonomi daerah sendiri merupakan suatu wajah baru bagi negara ini dalam sistem pemerintahan Indonesia. Daerah mendapat kepercayaan oleh Undang-undang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang di sebutkan oleh HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyebutkan pengertian otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat 6 Undang-undang ini menerangkan lebih lanjut makna atau arti dari daerah otonom yang artinya daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia saat ini dipayungi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi atas permintaan dari pemerintah daerah di Indonesia karena dianggap kurang mendukung keberlangsungan hidup otonomi daerah di Indonesia sendiri. Ada beberapa hal dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbau negatif dan memungkinkan untuk menciptakan suatu dinasti-dinasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau istilah lainnya adalah memunculkan raja-raja kecil didaerah-daerah, dan yang lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia “kebablasan” saat otonomi Indonesia di payungi oleh Undang-undang ini. Karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kurang begitu mendukung terciptanya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Kemudian lahirlah suatu payung hukum baru bagi kecerahan hidup otonomi daerah di Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menimbulkan berbagai kontroversi dilingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait keutuhan bentuk negara kesatuan Indonesia, karena Undang-

undang baru ini benar-benar memberi warna bagi otonomi di Indonesia. Walaupun sebenarnya otonomi daerah di Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian payung hukum yang menaunginya dan kemudian terbit Undang-undang baru yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah memberikan suatu keleluasaan kepada daerah untuk membenah diri dengan segala kemampuan dan keunikan yang dimilikinya sebagai senjata untuk memajukan daerahnya demi keberlangsungan hidup rakyat. Kebanyakan semua potensi daerah dipotensikan untuk membangun sektor ekonomi, sebab ekonomi yang dilihat dari jumlah angka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai berhasil dan sejahtera jika memiliki banyak jumlah nol hingga menyentuh angka triliunan rupiah. Salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia adalah dengan memberikan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Terkait masalah pendidikan, negara telah mewajibkan untuk merealisasikan sedikitnya 20% anggaran pendapatan dan belanja untuk pendidikan sehingga diharapkan masyarakat Indonesia bisa merasakan dunia pendidikan dinegaranya sendiri dan terbebas dari kebodohan. Konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap warga Negara, sehingga bukan menjadi alasan bahwa letak geografis atau rentang kendalai merupakan hambatan untuk tidak bisa mengakses atau mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara.

Setelah mendapat amanah dari Undang-undang, daerah-daerah di Indonesia terus berusaha melaksanakan mandat otonomi daerah dalam hal melaksanakan pendidikan bagi masyarakat daerah.

Kota Batam dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau pasti menghadapi berbagai masalah kebutuhan dasar, fenomena penduduk yang datang dari berbagai daerah di Indonesia bukanlah suatu fenomena baru. Sejak menjadi kota industri di dekat Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan Negara Singapura, menjadikan Batam daya tarik untuk mencari nafkah bagi para migran dari berbagai daerah di Indonesia.

Industri di Kota Batam yang sangat pesat menuntut masyarakat untuk memiliki *skill* yang memadai agar bisa bekerja dan menyesuaikan diri terhadap dunia kerja di industri Kota Batam. Ritme hidup masyarakat kota industri di Kota Batam memang sangat terasa, kesibukan kendaraan yang hilir mudik menuju sentra-sentra industri dari pagi hingga pagi kembali.

Fenomena kota industri menjadikan Kota Batam sibuk dengan kegiatan ekonomi tanpa henti, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya daerah penyangga (*hinterland*) industri itu tersebut. Sebagai daerah penyangga (*hinterland*), beberapa kecamatan di Kota Batam yang berada di pesisir kota, membutuhkan pendidikan yang layak, karena daerah *hinterland* merupakan daerah pemasok kebutuhan industri maupun kegiatan ekonomi di Kota Batam.

Standar kegiatan ekonomi Batam tentunya berbeda dengan standard ekonomi masyarakat *hinterland* Batam. Sebagai pemasok kebutuhan daerah *mainland*, tentunya daerah *hinterland* Batam harus mempunyai sumber daya

manusia yang memadai dan sesuai kebutuhan industri. Kegiatan ekonomi masyarakat yang fungsinya juga sebagai daerah penyokong daerah *mainland* harus benar-benar bisa menjadi cadangan yang siaga saat *mainland* membutuhkannya.

Hingga saat ini, Kota Batam telah melakukan pembenahan terhadap pendidikan, terutama di daerah *hinterland*. Karena daerah *hinterland* sangat memerlukan pembangunan sumber daya manusia setelah sekian lama hidup dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Batam terhadap sumber daya manusia di daerah *hinterland* Kota Batam adalah dengan memberikan beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi bagi siswa-siswi yang berasal dari daerah *hinterland* tanpa melihat suku bangsa, ras maupun agama, semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkannya.

Salah satu daerah *hinterland* Kota Batam yang turut merasakan program Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan sumber daya manusia daerah *hinterland* ini adalah siswa-siswi di Kelurahan Sembulang. Tingkat pendidikan di kelurahan ini mencapai peringkat kedua dari persentasi tingkat pendidikan di lingkup Kecamatan Galang. Terbukti dengan menyumbang para diploma dan sarjana dan master menyentuh rata-rata 20%, ini lebih baik dari kelurahan lain di Kecamatan Galang.

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan Di Kota Batam

No	Kecamatan <i>Mainland</i>	Tidak/Belum Sekolah	Kecamatan <i>Hinterland</i>	Tidak/Belum Sekolah
1	Batu Ampar	26,29 %	Belakang Padang	28,11 %
2	Sekupang	29,28 %	Bulang	36,49 %
3	Batu Aji	28,64 %	Galang	39,45 %
4	Lubuk Baja	42,35 %		
5	Sungai Beduk	24,30 %		
6	Bengkong	26,32 %		
7	Batam Kota	29,21 %		
8	Sagulung	30,05 %		
9	Nongsa	26,14 %		

Sumber: data olahan tahun 2014

Terkait peran Pemerintah Kota Batam sangatlah jelas, beasiswa dari pihak Pemerintah Kota Batam telah diberikan kepada masyarakat sekitar daerah *hinterland* direalisasikan melalui sekolah-sekolah. Beasiswa pada jenjang sarjana, diberikan tanpa pengecualian asalkan diterima di perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Batam. Setidaknya ada Universitas Riau Kepulauan, Universitas Batam, Politeknik Negeri Batam yang bisa dipilih sebagai tempat menuntut ilmu bagi siswa-siswi *hinterland* Kota Batam.

Kerjasama bagi pendidikan siswa-siswi *hinterland* juga terus ditingkatkan hingga membuka peluang untuk menempuh pendidikan diluar kampus yang ada di

Kota Batam yakni Universitas Gajah Mada hingga Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, untuk mahasiswa *hinterland* Kota Batam yang mendapatkan pendidikan di Universitas Gajah Mada mendapat tidak kurang dari 18 juta rupiah setiap tahunnya bagi mahasiswa dengan jurusan tertentu.

Bagi mahasiswa *hinterland* Kota Batam yang kuliah di Kota Batam pada tahun 2010 mendapatkan setidaknya 9 juta rupiah. Angkatan sebelumnya juga mendapatkan dengan sistem yang berbeda lagi. Mahasiswa hanya mendapatkan uang saku yang dibagikan sebesar 5 juta rupiah bersih tanpa memikirkan SPP.

B. Kerangka Penelitian/Berfikir

Adapun kerangka penelitian/kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah dimulai dengan konsep otonomi daerah yang diambil peneliti melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab IV Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13. Kemudian penulis mengkhususkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) yakni pendidikan sebagai penelitian.

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam hal pendidikan kemudian menjadi objek penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan melihat strategi yang diambil untuk menyamakan tingkat pendidikan daerah *hinterland* dengan daerah *mainland*.

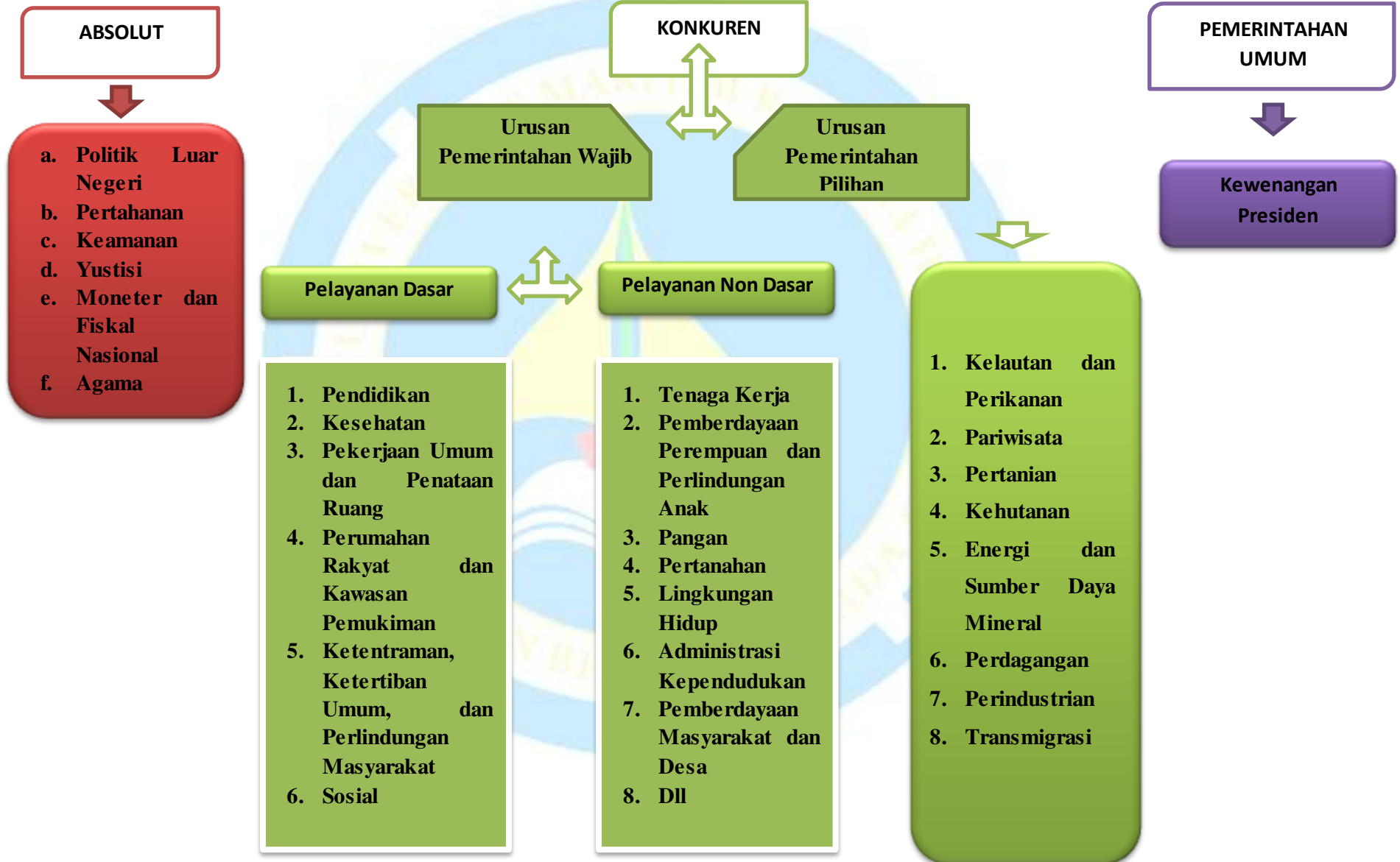
Adapun indikator yang peneliti jadikan tolak ukur guna mendapatkan jawaban atas strategi yang digunakan Pemerintah Kota Batam untuk menyetarakan tingkat pendidikan antara daerah *hinterland* dan daerah *mainland* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan pada proses sosialisasi,

2. Pengetahuan,
3. Mempersatukan kelompok atau masyarakat.



URUSAN PEMERINTAHAN



PENDIDIKAN

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM

PENGETAHUAN

DAPAT MEMPERSATUKAN KELOMOK

MEMBERIKAN ARAHAN PADA PROSES SOSIALISASI

1. ADANYA SOSIALISASI SECARA BERKELANJUTAN DARI DISDIK KOTA BATAM TENTANG PERAN, TUGAS DAN FUNGSI
2. ADANYA SOSIALISASI SECARA BERKELANJUTAN DARI DISDIK KOTA BATAM TENTANG PROG.KERJA UNTUK PENINGKATAN PENDIDIKAN DI DAERAH *HINTERLAND*

1. ADANYA PROG.KERJA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT *HINTERLAND*
2. ADANYA PENYAMPAIAN INFORMASI YANG JELAS DAN LANGSUNG TENTANG MANFAAT PENDIDIKAN BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANGSUNGAN HIDUP BAGI MASYARAKAT *HINTERLAND*
3. ADANYA KEGIATAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH DISDIK KOTA BATAM UNTUK DAERAH *HINTERLAND* DALAM PENINGKATAN PENGETAHUAN

1. ADANYA KERJASAMA YANG DILAKUKAN ANTARA DISDIK DENGAN MASYARAKAT *HINTERLAND* DALAM PEMNGEMBANGAN SITEM PENDIDIKAN
2. ADANYA KOORDINASI DISDIK DENGAN PIHAK LAIN GUNA MENYUKSESKAN PROGRAM KERJA DAN TUJUAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Sumber: UU No.23 Tahun 2014

- PERSAMAAN HAK TERHADAP PELAYANAN DASAR**
1. UU NO 20/2003
 2. UU NO 36/2009
 3. UU NO 26/2007
 4. UU NO 01/2011
 5. UU NO 13/2012

PENDIDIKAN
UU NO 20 TAHUN 2003
PENDIDIKAN NASIONAL

MASYARAKAT HINTERLAND

PEMERINTAH

PEMKO BATAM

STRATEGI
?



C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode yang bersifat kualitatif. Menurut Denzin dan Lincon (dalam Moleong: 5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kelurahan Sembulang Kota Batam. Lokasi ini diambil dengan pertimbangan lokasi yang merupakan daerah *hinterland* terpadat di Kecamatan Galang dan salah satu kelurahan dengan tingkat pendidikan yang cukup baik di Kecamatan Galang.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari dinas-dinas atau kantor-kantor pemerintah setempat terkait masalah serta masyarakat setempat yang diteliti serta data sekunder yang bersumber dari internet dan sumber-sumber lain yang memungkinkan.

Diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik tanya-jawab secara langsung kepada sumber terkait penelitian dengan alat yang digunakan adalah wawancara yang disusun terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu terkait objek kajian penelitian

b. Observasi

Observasi adalah untuk melihat secara langsung tentang fenomena atau gejala-gejala yang berada didaerah penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Dokumen

Dokumen adalah segala jenis dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Informan

Menurut Moleong (2002:90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual. Adapun yang menjadi informan adalah:

- 1) Dinas Pendidikan Kota Batam.
- 2) Kepala SMA Negeri 10 Batam.
- 3) Kepala SMP Negeri 18 Batam.
- 4) Masyarakat Kelurahan Sembulang.

4. Teknik Analisis Data

Analisa yang penyusun ambil melalui teknik deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2002:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

D. Hasil Penelitian

Secara khusus, sebagai daerah penyokong tentunya Batam memiliki tiga kecamatan yang menurut Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai kecamatan dengan kategori kecamatan *hinterland* dan mendapat kebijakan sesuai wilayah tersebut. Wilayah *hinterland* menurut Dinas Pendidikan adalah wilayah Kota Batam yang berada di luar pulau Batam, yakni wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang dan yang terakhir kecamatan yang terletak paling belakang adalah Kecamatan Galang.

A. Strategi Pemerintah Kota Batam dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat *Hinterland*

1. Memberikan Suatu Arahan pada Proses Sosialisasi

Memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi yaitu memberikan penyampaian informasi yang jelas dan langsung dari pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam kepada masyarakat *hinterland* Kelurahan Sembulang, dimensi ini dapat dilihat dari indikator yang berupa:

a. Adanya Sosialisasi Secara Berkelanjutan dari Dinas Pendidikan Kota Batam Tentang Peran, Tugas dan Fungsi

Hasil yang didapat dari wawancara yang didapat berdasarkan indikator “adanya sosialisasi secara berkelanjutan dari Dinas Pendidikan Kota Batam tentang peran, tugas dan fungsi” adalah:

Dinas Pendidikan belum melakukan kontak langsung kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang peran, tugas dan fungsi mereka selaku lembaga yang membidangi masalah pendidikan di Kota Batam.

b. Ada Sosialisasi Secara Berkelanjutan dari Dinas Pendidikan Tentang Program Kerja untuk Peningkatan Pendidikan didaerah *hinterland*.

Hasil dari wawancara yang didapat berdasarkan indikator “ada sosialisasi secara berkelanjutan dari Dinas Pendidikan tentang program kerja untuk peningkatan pendidikan didaerah *hinterland*, adalah:

Masyarakat *hinterland* dalam hal ini masyarakat pesisir Kelurahan Sembulang merasa Dinas Pendidikan perlu melakukan sosialisasi tentang program kerja terkait pendidikan untuk masyarakat *hinterland* khususnya. Mereka menginginkan adanya komunikasi aktif dari Dinas Pendidikan kepada mereka, apalagi saat musrenbang. Karena pada saat itu masyarakat berkumpul untuk bermusyawarah guna membangun daerah, sehingga sangat tepat jika Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi terkait program kerja mereka kepada masyarakat.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan atau ilmu yang di dapatkan oleh seseorang melalui pendidikan dan pelatihan serta pelajaran yang di peroleh seseorang baik secara formal maupun informal dengan sumber pendidikan yang memadai.

a. Adanya Program Kerja untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat *Hinterland*

Wawancara yang didapat berdasarkan indikator “adanya program kerja untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat *hinterland*” adalah:

Masyarakat *hinterland* di Kelurahan Sembulang merasakan adanya bantuan berupa beasiswa untuk masyarakat miskin, bantuan biaya transportasi bagi siswa yang melakukan penyeberangan laut, bantuan bus sekolah gratis bagi siswa yang melakukan penyeberangan jalur darat, bantuan rumah dinas bagi guru-guru di daerah *hinterland* termasuk bantuan penginapan atau asrama gratis bagi siswa yang sangat jauh jangkanya menuju sekolah agar siswa benar-benar fokus dalam menuntut ilmu. Bantuan asrama ini selalu memprioritaskan siswa-siswa yang secara geografis jauh dari sekolah dan memiliki kemungkinan akan terlambat jika harus pergi dan pulang setiap harinya sehingga waktu siswa hanya terbuang untuk kegiatan pergi dan pulang dari sekolah saja.

**b. Adanya Penyampaian Informasi yang Jelas dan Langsung tentang
★ Manfaat Pendidikan Bagi Kesejahteraan dan Keberlangsungan
Hidup bagi Masyarakat *Hinterland***

Wawancara yang didapat berdasarkan indikator “adanya penyampaian informasi yang jelas dan langsung tentang manfaat pendidikan bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup bagi masyarakat *hinterland*” adalah:

Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah serta jauh dari sumber-sumber informasi tentang pendidikan sangat membutuhkan kontak langsung yang nyata bukan hanya sekedar ucapan ataupun kertas kerja tanpa implementasi sebenarnya.

c. Adanya Kegiatan Nyata yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk Daerah *Hinterland* dalam Peningkatan Pengetahuan Demi Terciptanya Tujuan Pendidikan.

Wawancara yang di dapat berdasarkan indikator “adanya kegiatan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk daerah *hinterland* dalam peningkatan pengetahuan demi terciptanya tujuan pendidikan” adalah:

Masyarakat benar-benar merasakan bagaimana Dinas Pendidikan telah melakukan tugas yang baik terkait peningkatan pengetahuan demi terciptanya tujuan pendidikan didaerah *hinterland*. Dimana sekarang hampir setiap kampung di Kelurahan Sembulang sudah memiliki sekolah dasar masing-masing sehingga anak-anak usia sekolah dasar yang baru masuk tidak perlu keluar kampung untuk mendapatkan pendidikan.

3. Dapat Mempersatukan Kelompok

Dapat mempersatukan kelompok yaitu adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara Dinas Pendidikan dengan masyarakat atau dengan dengan lembaga lain baik SKPD maupun swasta.

a. Ada Kerja Sama yang Dilakukan Antara Dinas Pendidika dengan Masyarakat *Hinterland* dalam Pengembangan Sistem Pendidikan

Wawancara yang didapat berdasarkan indikator “Ada kerja sama yang dilakukan antara dinas pendidika dengan masyarakat *hinterland* dalam pengembangan sistem pendidikan” adalah:

Masyarakat Kelurahan Sembulang tidak merasakan adanya sosialisasi atas pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui komite sekolah, tokoh masyarakat peduli pendidikan atau pun dari pemerintah setempat.

b. Ada Kerja Sama yang Dilakukan Antara Dinas Pendidikan dengan Pihak Lain Guna Menyukkseskan Program Kerja dan Tujuan Pendidikan Didaerah *Hinterland*

Wawancara yang didapat berdasarkan indikator “adanya koordinasi Dinas Pendidikan dengan pihak lain guna menyukkseskan program kerja dan tujuan pendidikan didaerah *hinterland*”

Menyukkseskan program pendidikan untuk masyarakat *hinterland* Dinas Pendidikan telah melakukan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain termasuk dengan pihak swasta di Kota Batam agar tercapai tujuan peningkatan pendidikan bagi masyarakat *hinterland*.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Pemaparan dan hasil analisis atas wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang dianggap berkompeten dan memiliki pengetahuan dan atau informasi mengenai pendidikan, khususnya tentang pendidikan didaerah *hinterland* sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan sosialisasi tentang peran, tugas serta fungsinya, Dinas Pendidikan belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat *hinterland*, sosialisasi

hanya dilakukan kepada sekolah melalui rapat-rapat dengan kepala sekolah ataupun dengan guru-guru yang mewakili sekolah.

Penyampaian program kerja yang dianggap penting bagi pendidikan masyarakat *hinterland* juga belum dilakukan secara langsung sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja program kerja tersebut, segala bentuk sosialisasi mengenai pendidikan hanya didapat dari sekolah-sekolah tempat anak mereka sekolah.

Bentuk program kerja dari Dinas Pendidikan yang benar-benar dirasa secara langsung oleh masyarakat adalah berupa beberapa bantuan operasional, seperti bantuan bus sekolah secara gratis bagi siswa di daerah *hinterland*, bantuan biaya transportasi laut, bantuan asrama siswa serta bantuan rumah dinas bagi guru di daerah *hinterland*.

Program kerja yang berupa kebijakan pendidikan pada dasarnya sama dengan di daerah *mainland*, belum ada kebijakan yang signifikan membedakan antara kebijakan untuk daerah *hinterland* dengan daerah *mainland* seperti melakukan rapat-rapat tentang sosialisasi peran, tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dilakukan sama dengan daerah *mainland*, hanya beberapa koordinasi program kerja antar wilayah untuk SMP dilakukan dengan wilayah masing-masing tapi tetap beranggotakan sekolah *mainland*.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan belum menjalankan perannya secara baik untuk peningkatan pendidikan masyarakat *hinterland* khususnya di Kelurahan Sembulang

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran-saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Dinas Pendidikan Kota Batam dapat melakukan sosialisasi peran, tugas, fungsi dan program kerja kepada masyarakat *hinterland* secara langsung, guna menjalin pola komunikasi dua arah, agar masyarakat bisa menyampaikan kritik ataupun saran bagi kemajuan pendidikan di daerah *hinterland*.
2. Dinas Pendidikan tetap mempertahankan program kerja berupa bantuan fasilitas penunjang pendidikan yang sudah diberikan saat ini, karena bantuan seperti bus sekolah, bantuan operasional kendaraan laut dan sebagainya sangat membantu masyarakat *hinterland* dalam menempuh akses pendidikan.
3. Dinas Pendidikan dapat membuat program kerja yang signifikan antara program kerja untuk daerah *hinterland* dengan *mainland*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andika, Dicky, 2012, *Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Perspektif United Nation Development Program dan Persiapan Pemilu 2014)* Skripsi, Ilmu Politik Universitas Andalas

Ardianto, Elvinaro, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media: Bandung

Buchory, Herry Achmad dan Djaslim Saladin, 2010, *Manajemen Strategis (Cetakan ke-1)*, Linda Karya: Bandung

Budhita, IGN Gede, 2004, *Strategi Pengelolaan Museum Le Mayeur Sanur*, Profram Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana: Denpasar

- Hunger, David dan ThomasL Wheelen, 2003, *Manajemen Strategis (cetakan ke-2)*, Andi:Yogyakarta
- Kaloh, J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Nasution, Zulkarnaen, 2007, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, PT. Rajawali Pers, Jakarta
- Nawawi, Hadari, 2005, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Dibidang Pendidikan (Cetakan ke-3)*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Oliver, Sandra, 2007, *Strategi Public Relations*, Erlangga: Jakarta
- Rangkuti, Freddy, 2006, *Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Rozali, Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarundajang, S, H, 2005,*Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2003, *Manajemen Strategi*, Bumi Aksara: Jakarta
- Simamora, Hendry, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN: Yogyakarta
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tjiptono, F, 2000, *Strategi Pemasaran Jasa*, Andi: Yogyakarta
- Widjaja, H, A, W, 2009, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kota Batam.

